

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 03/SPK/KIW/11/2025
Tanggal : 06 November 2025

TENTANG
PEKERJAAN JASA RETAINER LAWYER TAHUN 2025-2026

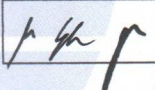
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan :

1. Surat PT Kawasan Industri Wijayakusuma Nomor: 146/S/KIW/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025 Perihal Informasi Pekerjaan;
2. Berita Acara Nomor : 84/BA/KIW/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Aanwijzing Pekerjaan Jasa Retainer Lawyer Tahun 2025-2026.
3. Surat Law Firm Abdurrahman & Co nomor: P355/LFANCO/XI/2025 tanggal 3 November 2025 Perihal Penawaran Kerjasama Jasa Bantuan Hukum (Retainer).
4. Berita Acara Nomor : 05/BA/KIW/11/2025, tanggal 3 November 2025, tentang Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Jasa Retainer Lawyer Tahun 2025-2026.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

Jalan Raya Semarang - Kendal KM. 12, Semarang, Jawa Tengah 50181
Telp.: (024) 8662156 Fax.: (024) 8661476
Email: go_kiw@kiw.co.id
www.kiw.co.id



Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** akan menerangkan terlebih dahulu atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas pengelola Kawasan Industri Wijayakusuma.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum non dagang (jasa) yang bergerak di bidang jasa bantuan hukum.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan kerjasama di bidang hukum (Retainer) pada kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menyanggupi untuk memberikan jasa hukum kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan kerjasama di bidang hukum (Retainer) dengan kondisi dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **PENUNJUKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai konsultan / penasehat hukum tetap bagi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima penunjukan dan penugasan oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut pada pasal 1 ayat (1) Surat Perintah Kerja (SPK) ini;

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Ruang Lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Konsultasi Hukum
 - b. *Legal Opinion*
 - c. *Legal Review*
 - d. *Legal Drafting*
 - e. Pengurusan perizinan
 - f. Pendampingan Bisnis
 - g. Penanganan Perkara
 - h. Legal Review dan Pendampingan atas transaksi bisnis
 - i. Audit Hukum / Legal due Diligence Service
 - j. Merger, Akuisisi, Spin Off, Split Off
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa hukum **PIHAK KEDUA** dalam hal Litigasi , akan dituangkan dalam kontrak terpisah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

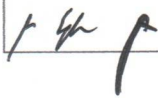
3. Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ini, hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat Surat Perintah Kerja (SPK) ini, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang. Jika kata – kata dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka **PARA PIHAK** harus mencapai kesepakatan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan arti dari klausul yang dipermasalahkan.
4. **PARA PIHAK** harus memenuhi seluruh hukum, peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dari suatu pemerintah atau badan pembuat peraturan yang memiliki yuridikasi atas Pekerjaan dan/atau Lokasi Kerja.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

1. Surat Perintah Kerja (SPK) ini berlaku untuk Jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 9 November 2025 sampai dengan 9 November 2026.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri sebelum Jangka Waktu Surat Perintah Kerja (SPK) ini berakhir, maka Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perintah Kerja (SPK) ini harus memberitahukan tentang maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) ini berakhir.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini, maka **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan kewajiban yang terhutang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut berlaku efektif.
4. Apabila terjadi pengakhiran Surat Perintah Kerja (SPK) karena sebab apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Apabila Jangka Waktu Surat Perintah Kerja (SPK) ini telah berakhir, atas kesepakatan **PARA PIHAK** maka Surat Perintah Kerja (SPK) ini dapat diperpanjang kembali dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

PASAL 4 **BIAYA DAN MEKANISME**

1. Biaya Pekerjaan kerjasama di bidang hukum (Retainer Lawyer) disepakati
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama, sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dibuktikan dengan dokumen pendukung pembayaran.

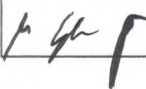
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Pembayaran kedua, sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan pada bulan
dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dokumen laporan
pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima disertai dokumen pendukung
pembayaran.
3. Professional Fee penanganan perkara litigasi sebesar |
per perkara / Surat Kuasa.
 4. **PIHAK KEDUA** membebaskan biaya pembuatan Legal Opinion sebanyak 5x (lima
kali) produk selama masa kontrak dan untuk selebihnya akan dikenakan biaya
sebesar untuk setiap legal opinion.
 5. *Legal Drafting* dan Pendampingan atas transaksi bisnis di bawah nominal
(lima belas juta rupiah) per legal drafting.
 6. *Legal Drafting* dan Pendampingan atas transaksi bisnis di atas nominal
 7. *Legal Audit* Professional Fee Pembuatan Legal Audit
per legal audit.
 8. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat apabila **PIHAK PERTAMA** memerintahkan **PIHAK
KEDUA** untuk menjalankan tugas hukum diluar Kota Semarang, maka semua
biaya akomodasi ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengikuti ketentuan
biaya akomodasi yang berlaku di PT Kawasan Industri Wijayakusuma.
 9. Apabila terdapat Operasional Fee atas pelaksanaan pekerjaan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1, **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada
PIHAK PERTAMA untuk dapat ditagihkan Operasional Fee kepada **PIHAK
PERTAMA** yang besarnya disepakati dengan Berita Acara Kesepakatan oleh
PARA PIHAK.
 10. **PIHAK KEDUA** memberikan dokumen pendukung pembayaran / penagihan
kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK
KEDUA**.
 11. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa untuk sahnya pembayaran harus
dilakukan dengan transfer melalui :

dan kemudian mengirimkan copy nota transfer kepada **PIHAK KEDUA**, dan
pembayaran tersebut dianggap telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** jika uang yang
ditransfer telah masuk kedalam rekening **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK
KEDUA** akan menerbitkan kwitansi untuk itu.

PASAL 5 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berwajib untuk mengerahkan seluruh keahlian guna
melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk membayar biaya honorarium kepada **PIHAK
KEDUA** segala biaya jasa konsultan dan/atau bantuan hukum yang besarnya
adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Surat Perintah Kerja (SPK) ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 6 **PENGALIHAN**

Surat Perintah Kerja (SPK) ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini kepada pihak manapun juga kecuali dengan persetujuan tertulis yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 **PENGAKHIRAN KONTRAK**

1. Surat Perintah Kerja (SPK) ini berakhir apabila jangka waktu telah selesai.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dapat diakhiri apabila terjadi *force majeure* seperti perang, bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan konsultasi/bantuan hukum ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak ini bilamana **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi tugas - tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8 **AZAS KERAHASIAAN DAN EKSKLUSIVITAS**

1. **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa selama jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan akses pada informasi dan data secara lisan maupun tertulis, dalam bentuk elektronik maupun non elektronik lainnya yang dapat dibaca, yang merupakan milik **PIHAK PERTAMA** yang bersifat rahasia dan tidak/belum pernah diberikan kepada pihak manapun (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") dan semua informasi lainnya yang berhubungan, yang diperoleh dari karyawan atau pengurus Pihak Pertama dan/atau karyawan atau pengurus PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA.
2. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikatkan dirinya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyimpan dan memegang kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut dan tidak diperkenankan untuk mengungkapkan, memperlihatkan/menunjukkan, menyebarluaskan, mengiklankan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh Informasi Rahasia tersebut termasuk syarat dan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak siapapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, kecuali kepada karyawan atau pengurus **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Representasi") yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan yang secara langsung terkait dengan Kerjasama berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Representasi atas ketentuan mengenai kerahasiaan dari Informasi Rahasia ini dan akan memastikan Pihak Representasi untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan ini seolah - olah Pihak Representasi itu adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan kerahasiaan ini; karenanya **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran masing – masing Pihak Representasi terhadap ketentuan kerahasiaan ini;
3. Pada waktu berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK) ini maka **PIHAK KEDUA** dan atau Pihak Representasi harus segera mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** semua Informasi Rahasia yang berada di bawah kontrol **PIHAK KEDUA** dan menghapus semua Informasi Rahasia di dalam data base di komputer atau perangkat lain yang dipakai untuk menyimpan Informasi Rahasia tersebut dan membuat surat pernyataan dan berita acara yang mengkonfirmasi pengembalian atau pemusnahan atau penghapusan Informasi Rahasia tersebut; Kewajiban **PIHAK KEDUA** dan/atau Pihak Representasi untuk menjaga kerahasiaan ini akan terus berlangsung meskipun jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) ini telah berakhir.

PASAL 9 **PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan/ sebagai akibat dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 10 **PERUBAHAN, PENGURANGAN, DAN/ATAU PENAMBAHAN**

Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan dan atau penambahan atas isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini, maka para pihak akan merundingkannya secara musyawarah dan mufakat serta hasilnya akan dituangkan kedalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

PASAL 11 **LAIN - LAIN**

1. **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan bersedia diaudit baik internal maupun eksternal.
2. Jika salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka keberlakuan, keabsahan atau dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini tidak akan berpengaruh ataupun berkurang.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil – wakil yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan/atau lampiran/surat-surat lainnya merupakan wakil- wakil yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**. Apabila wakil – wakil tersebut terbukti tidak berwenang mewakili **PARA PIHAK**,

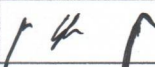
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

maka Surat Perintah Kerja (SPK) ini tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** dan wakil – wakil tersebut dan **PARA PIHAK** setuju untuk menegaskan dan menyatakan kembali Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan memastikan wakil – wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** menandatangani penegasan dan pernyataan kembali dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

PIHAK KEDUA
LAW FIRM ABDURRAHMAN & CO

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

maka Surat Perintah Kerja (SPK) ini tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** dan wakil – wakil tersebut dan **PARA PIHAK** setuju untuk menegaskan dan menyatakan kembali Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan memastikan wakil – wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** menandatangani penegasan dan pernyataan kembali dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

PIHAK KEDUA
LAW FIRM ABDURRAHMAN & CO

Pihak Pertama	Pihak Kedua
